

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT.Bina Aksara.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan.
- Azmi Fendri, 2016, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batu Bara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Bambang Waluyo, 2010, *Penelitian Hukum Dalarn Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Deddy Ismatullah, 2007, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Effendi Perangin, 2014, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Erly Suandy, 2011, *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
- Hilman Hadikusumah, 1980, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni.
- Iwan Mulyawan, 2010, *Panduan Pelaksana Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Johan Kaloh, 2007, *Mencari bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alumni.
- Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- K.J. Davey, 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Jakarta: UI Press.
- Marihot Pahala Siahaan, 2003, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Teori dan Praktek*, Cetakan 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muh. Jufri Dewa, 2011, *Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Kendari: Unhalu Press.
- Muhammad Rusjdi, 2005, *Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Materai*, Jakarta: PT. Indeks.
- Muhammad Yamin Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi, 2011, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Paulus Efendie Lotulung, 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, et.al, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Rochmat Soemitro, 1991, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung: PT. Eresco.

- R. Santoso Brotodihardjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cet. Pertama, Edisi Keempat, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya.
- , 2019, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- Soleman B Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press.
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia.
- Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana.
- Wantijk Saleh, 1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2004, *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Jakarta : Salemba Empat.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Hibah Wasiat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat.

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB.

Keputusan Menteri Keuangan No. 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/PMK.03/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 33/PMK.03/2008 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 14/PMK.03/2009 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak.

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 76 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Pontianak.

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah.

MAKALAH / JURNAL / TESIS / DISERTASI :

Machmut Sidik, 2002, *Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Seminar, Bandung.

Philipus M. Hadjon, 1998, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I, Januari.

Rizal Effendi, 2008, *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro.

INTERNET :

Damang, *Efektifitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 16.00 wib.

Damar Adhy Suksmono, 2013, *Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Tanah Waris Dalam Konsep Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Di Kabupaten Cilacap*. Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/66211>, diakses pada tanggal 11 Maret 2022.

Proses Warisan". <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2026243-proses-warisan/>, diakses tanggal 27 Juli 2022, pukul 20.35 WIB.

Temmy Murdiatmo, 2007, *Pelaksanaan Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Warisan Tanah Dan/Atau Bangunan Di Kota Malang*, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, http://eprints.undip.ac.id/17914/1/TEMMY_MURDIATMO.pdf, diakses pada tanggal 11 Maret.